

DAERAH - PAJAK DAN RETRIBUSI

2023

PERDAKOT. PASURUAN NO. 4, LD 2023/NO. 4, TLD NO. 4, HLD KOT. PASURUAN HLM. 137

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

ABSTRAK : – Dalam rangka merespons perkembangan administrasi perpajakan dan retribusi di Daerah, percepatan pelayanan, dan menunjang kemudahan berinvestasi sebagai optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang transparan dan akuntabel, selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah untuk menjadikan seluruh jenis pajak Daerah dan retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah.

– Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 46 Tahun 1982; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2021; PP No. 34 Tahun 2021; PP No. 4 Tahun 2023; PP No. 35 Tahun 2023;

– Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pajak terdiri dari Jenis Pajak; Objek dan Subjek Pajak meliputi PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Opsen PKB dan Opsen BBNKB; Masa Pajak dan Tahun Pajak; Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan; Retribusi terdiri dari Jenis Retribusi meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu; Peninjauan Tarif Retribusi; Penyesuaian Tarif Pajak dan Retribusi; Pemungutan Pajak dan Retribusi; Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi; Kerahasiaan Data Wajib Pajak; Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

CATATAN : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Desember 2023.

– Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

– Penjelasan : 15 hlm.